

**KETERLIBATAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM PENGUATAN
KEBIJAKAN SYARIAH ISLAM DI TINGKAT LOKAL STUDI: KOTA BANDA ACEH**

Rizka Alvirra¹, Silka Sulistia², Alif Fitra³, Rahmad Hidayat⁴, Nofriadi⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Syiah Kuala, Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh

Email Korespondensi: rizkaalvirra7@gmail.com

Email: silkasulistia01@gmail.com; aliffitra1011@gmail.com; rahmat2622836@gmail.com,
nofriadi_fisip@usk.ac.id

ABSTRACT

This study examines the involvement of the Prosperous Justice Party (Partai Keadilan Sejahtera/ PKS) in strengthening Sharia-based public policy at the local level, with a specific focus on Banda Aceh City, Indonesia. The purpose of this research is to analyze how PKS contributes to the formulation, implementation, and reinforcement of Sharia regulations within the local governance framework, particularly through its legislative, participatory, and supportive roles. The study is motivated by the unique position of Aceh as the only Indonesian province with formal authority to implement Islamic law through regional regulations (qanun), as well as the strategic role of political parties in shaping public policy outcomes. This research employs a qualitative descriptive method using in-depth interviews with key informants, including a PKS legislative representative and community members in Banda Aceh. Data were analyzed using an interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The analysis is guided by Soekanto's role theory, which categorizes roles into active, participatory, and passive dimensions. The findings indicate that PKS plays a significant role in strengthening Sharia policy through active involvement in legislative processes, including the drafting and enactment of qanun, as well as through budgetary support and policy oversight in the Banda Aceh Regional House of Representatives (DPRK).

Keywords: Political Parties, PKS, Islamic law.

ABSTRAK

Studi ini mengkaji keterlibatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam penguatan kebijakan publik berbasis Syariah di tingkat lokal, dengan fokus khusus pada Kota Banda Aceh, Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana PKS berkontribusi dalam perumusan, implementasi, dan penguatan peraturan Syariah dalam kerangka tata kelola daerah, khususnya melalui peran legislatif, partisipatif, dan pendukungnya. Studi ini dilatarbelakangi oleh posisi unik Aceh sebagai satu-satunya provinsi Indonesia yang memiliki wewenang formal untuk menerapkan hukum Islam melalui peraturan daerah (qanun), serta peran strategis partai politik dalam membentuk capaian kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif menggunakan wawancara mendalam dengan informan kunci, termasuk perwakilan legislatif PKS dan anggota masyarakat di Banda Aceh. Data dianalisis menggunakan model interaktif yang terdiri dari reduksi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini dipandu oleh teori peran Soekanto, yang mengkategorikan peran ke dalam dimensi aktif, partisipatif, dan pasif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa PKS berperan penting dalam memperkuat kebijakan Syariah melalui keterlibatan aktif dalam proses legislasi, termasuk penyusunan dan pemberlakuan qanun, serta melalui dukungan anggaran dan pengawasan kebijakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRK) Banda Aceh.

Kata kunci: Partai Politik, PKS, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki keragaman dalam praktik kehidupan beragama, termasuk dalam konteks kebijakan publik. Dalam kerangka desentralisasi, beberapa daerah diberikan kewenangan khusus untuk mengatur urusan keagamaan secara lebih luas. Salah satu daerah yang memiliki kekhususan tersebut adalah Aceh, yang secara formal diberikan legitimasi untuk menerapkan Syariat Islam melalui berbagai regulasi perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penerapan Syariat Islam ini tidak hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pemerintahan dan kebijakan publik di tingkat lokal. Dengan adanya undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi suatu hal yang sangat luar biasa bagi Pembangunan yang ada diprovinsi Aceh dalam mengembangkan Aceh menjadi provinsi yang lebih baik lagi (Afrijal & Helmi, 2022).

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki keistimewaan dalam penerapan Syariat Islam yang diatur melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Implementasi Syariat Islam di Aceh kemudian dituangkan dalam bentuk qanun sebagai peraturan daerah yang mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh, termasuk aspek hukum, sosial, dan budaya. Kehadiran kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam secara kaffah sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai aktor, termasuk partai politik sebagai bagian dari sistem demokrasi. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Banda Aceh menjadi pusat pelaksanaan kebijakan Syariat Islam yang relatif lebih intens dibandingkan daerah lain di Aceh. Implementasi kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk berbagai qanun yang mengatur aspek kehidupan masyarakat, seperti hukum jinayat, busana Islami, serta tata pergaulan sosial. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan, seperti pelanggaran terhadap qanun, lemahnya pengawasan, serta dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang.

Dalam proses pembentukan dan penguatan kebijakan daerah, aktor politik memiliki peran yang sangat strategis. Partai politik sebagai lembaga representasi masyarakat di legislatif berfungsi dalam proses legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Partai politik merupakan sarana penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang kemudian dirumuskan menjadi kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan rakyat (Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, 2023). Selain itu, partai politik memiliki peran penting dalam mengelola kader yang berada di lembaga eksekutif maupun legislatif serta memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk dalam aspek hak asasi manusia (Ulfa dkk., 2024). Dalam suatu sistem pemerintahan, kewenangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengelolaan sosial. Oleh karena itu, partai politik memiliki fungsi penting dalam mengarahkan dan mengelola kehidupan sosial masyarakat (Lianti & Dwi Utami, 2023). Salah satu fungsi lembaga politik adalah memberikan pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip good governance (Alqarni dkk., 2023). Dengan demikian, arah dan kualitas kebijakan publik, termasuk kebijakan berbasis Syariat Islam, sangat dipengaruhi oleh peran dan komitmen partai politik yang terlibat dalam pemerintahan daerah.

Dalam perspektif hukum Islam, pembentukan maupun penguatan kebijakan harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan umat (masalahah) dan keadilan. Oleh karena itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai yang berlandaskan nilai-nilai Islam dituntut untuk memastikan bahwa penguatan kebijakan Syariat Islam di Banda Aceh benar-benar bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan sekadar kepentingan politik sesaat (Jabir dkk., 2024). Partai politik juga memiliki pengaruh yang besar dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan sehingga keberadaannya sangat menentukan arah pembangunan daerah (Jamba, 2024). Menurut Ichlasul Amal, partai politik merupakan suatu keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Partai politik sebagai organisasi idealnya berfungsi untuk mengaktifkan dan memobilisasi masyarakat dalam partisipasi politik, mewakili berbagai kepentingan, menyediakan ruang kompromi atas berbagai perbedaan pendapat, serta menjadi sarana suksesi kepemimpinan politik yang sah dan damai (Nur Fitri Rahmadani, 2024). Partisipasi politik sendiri

berkaitan dengan keterlibatan individu maupun kelompok dalam aktivitas politik, termasuk penggunaan hak suara dalam pemilihan umum (Rohman, 2023).

Namun demikian, berbagai permasalahan masih sering terjadi dalam negara demokrasi, seperti pelaksanaan fungsi partai politik yang belum sesuai dengan harapan masyarakat sehingga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan publik (Kurniawan & Handayani, 2022). Dalam konteks ini, peran partai politik menjadi sangat penting tidak hanya sebagai peserta kontestasi kekuasaan, tetapi juga sebagai agen pendidikan politik dan penguatan kebijakan publik. Partai politik yang berbasis nilai-nilai Islam, seperti PKS, memiliki posisi strategis dalam mendukung implementasi Syariat Islam melalui fungsi sosialisasi, advokasi, dan pembentukan opini publik. Selain itu, partai politik diharapkan mampu menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat sehingga pelaksanaan Syariat Islam dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Ghifari, 2025).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai politik yang memiliki basis elektoral yang cukup kuat serta dikenal dengan karakteristik ideologinya yang berorientasi pada nilai-nilai Islam (Alamsyah & Hendra, 2023). PKS tidak hanya berfokus pada perolehan kekuasaan, tetapi juga menekankan pentingnya kaderisasi politik yang berkelanjutan. Selain itu, PKS memberikan ruang strategis bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik dan pembangunan sosial (Haq, 2024). Efektivitas demokrasi pada dasarnya sangat ditentukan oleh kualitas partai politik karena partai politik merupakan penghubung utama antara masyarakat dengan kebijakan pemerintah (Rahayu dkk., 2024). Sebagai partai yang mengedepankan nilai-nilai syariat, PKS memiliki tanggung jawab politik untuk mendorong terciptanya keselarasan antara struktur, substansi, dan kultur hukum dalam sistem pemerintahan di Aceh. Penguatan kepastian hukum hanya dapat diwujudkan melalui penataan hubungan fungsional antar lembaga penegak syariat agar implementasi qanun dapat berjalan lebih adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat. Dalam konteks Banda Aceh, PKS memiliki posisi strategis di lembaga legislatif yang memungkinkan partai ini berkontribusi dalam proses pembentukan dan penguatan berbagai qanun syariat.

Keberadaan PKS di Kota Banda Aceh memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan roda demokrasi dan pemerintahan daerah. Sebagai organisasi yang dibentuk atas dasar kesamaan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan bangsa, PKS tidak hanya berfungsi sebagai peserta pemilu, tetapi juga sebagai sarana pendidikan politik, penyalur aspirasi, dan rekrutmen politik. Dalam konteks penguatan kebijakan publik berbasis keagamaan, peran ini menjadi semakin strategis karena partai politik bertindak sebagai perantara utama dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal (Athiyatul Mufidah & Abdullah Syarofi, 2024). Partai-partai politik Islam di Indonesia juga kerap mendorong penerapan prinsip-prinsip syariat dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan hukum. Pada tingkat nasional, upaya tersebut terlihat dalam pengembangan regulasi terkait ekonomi syariah, perbankan syariah, dan asuransi syariah. Sementara itu, pada tingkat daerah, beberapa wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim, terutama Aceh, menerapkan Syariat Islam secara lebih luas melalui berbagai peraturan daerah dan qanun syariat.

Meskipun demikian, peran PKS dalam penguatan kebijakan Syariat Islam di Banda Aceh masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai dinamika politik lokal, seperti koalisi partai, kepentingan politik, serta respons masyarakat terhadap kebijakan syariat. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji sejauh mana kontribusi PKS dalam memperkuat kebijakan Syariat Islam, apakah bersifat substantif atau hanya simbolik. Dalam upaya memperkuat implementasi Syariat Islam, PKS dituntut untuk menjalankan mekanisme rekrutmen politik yang demokratis dan terbuka guna menghasilkan pemimpin daerah yang kompeten. Proses seleksi kandidat yang dilakukan partai harus mencerminkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Melalui rekrutmen berbasis kompetensi, prestasi, dan integritas, PKS dapat memastikan bahwa kader-kader yang diusung mampu mengawal implementasi qanun syariat secara substantif.

Penegakan kebijakan Syariat Islam di Banda Aceh saat ini masih menghadapi tantangan berupa

ketidakjelasan yurisdiksi antara lembaga penegak regulasi daerah. Tumpang tindih kewenangan antara Wilayahul Hisbah (WH) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mengawasi pelanggaran Qanun Jinayat sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mengatur secara tegas mekanisme pembagian tugas dan kewenangan antar lembaga sehingga berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan Syariat Islam. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menganalisis sejauh mana PKS mampu mengoptimalkan peran kelembagaannya dalam menjawab berbagai persoalan sistemik dalam penerapan Syariat Islam. Di tengah kompleksitas politik lokal dan tantangan koordinasi antarinstansi daerah, kontribusi PKS sebagai partai yang berlandaskan nilai-nilai Islam menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas fungsi partai politik. Kajian ini difokuskan pada evaluasi strategi PKS dalam memperkuat fondasi hukum syariat guna mewujudkan tatanan masyarakat Banda Aceh yang religius, tertib, dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan penelitian mengenai peran PKS dalam penguatan kebijakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi partai politik dalam penguatan kebijakan berbasis agama serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas implementasi Syariat Islam. Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian Nofriadi dkk. (2025) berjudul *Peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Implementasi Kebijakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh* lebih menitikberatkan pada implementasi dan penegakan Syariat Islam. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada peran PKS dalam penguatan kebijakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Penelitian ini penting dilakukan mengingat Banda Aceh merupakan pusat penerapan Syariat Islam di Aceh, sehingga diperlukan dukungan politik yang kuat untuk menjaga dan memperkuat implementasi nilai-nilai syariat secara berkelanjutan. Dengan posisi PKS sebagai salah satu partai yang memiliki pengaruh signifikan di parlemen Kota Banda Aceh, partai ini memiliki peluang besar untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan advokasi kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Banda Aceh dalam penguatan kebijakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan melalui pengumpulan data secara langsung, salah satunya melalui wawancara mendalam dengan informan yang relevan (Hanyfah dkk., 2022). Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta empiris yang ditemukan selama penelitian. Analisis penelitian ini mengacu pada teori peran yang dikemukakan oleh Soekanto (2001), yang membagi peran ke dalam tiga bentuk, yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Teori tersebut digunakan sebagai landasan untuk menganalisis keterlibatan PKS dalam penguatan kebijakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh sebagai wilayah yang menjadi pusat pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada posisi strategis Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi sekaligus daerah yang memiliki implementasi kebijakan Syariat Islam yang relatif lebih intensif dibandingkan wilayah lainnya di Aceh.

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive berdasarkan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Adapun informan penelitian terdiri atas:

1. Faisal Qasim selaku Sekretaris DPD PKS Kota Banda Aceh.
2. Putri Mutia Ilaura, masyarakat Kota Banda Aceh.
3. Fatiyatul Awfar, masyarakat Kota Banda Aceh.
4. Natasya Bethari, masyarakat Kota Banda Aceh.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) kepada para

informan. Pertanyaan wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian dan dikaitkan dengan teori yang relevan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai peran PKS dalam penguatan kebijakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara berkelanjutan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap informasi yang diperoleh dari para informan serta menyesuaikannya dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 2 April 2026 dengan melakukan wawancara langsung kepada seluruh informan yang telah ditentukan.

PEMBAHASAN

Peran Partai Politik Dalam Proses Pengambilan Keputusan

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan publik melalui keterlibatan kader-kadernya yang berada di lembaga legislatif maupun eksekutif. Partai politik tidak hanya berfungsi sebagai representasi masyarakat, tetapi juga sebagai sarana partisipasi politik yang menghubungkan kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Melalui fungsi tersebut, partai politik memiliki pengaruh yang besar terhadap proses pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan publik. Selain itu, partai politik juga berperan dalam menentukan keberlangsungan sistem demokrasi dan stabilitas politik nasional (Wibowo & Darmawan, 2021).

Dalam sistem demokrasi, partai politik berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat sehingga berbagai aspirasi masyarakat dapat disalurkan melalui mekanisme politik yang tersedia (Susilawati, 2023). Untuk memperoleh dukungan masyarakat, partai politik juga menerapkan berbagai strategi politik, termasuk pemanfaatan media sosial dan pendekatan langsung kepada masyarakat dalam kontestasi pemilu (Fahruji & Fahrudin, 2023). Oleh karena itu, partai politik menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas demokrasi melalui proses pemilihan umum maupun melalui berbagai kebijakan yang dihasilkan dalam sistem pemerintahan (Pattalongi dkk., 2024).

Penelitian ini menganalisis peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam penguatan Syariat Islam di Kota Banda Aceh dengan menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Soekanto (2001), yang membagi peran ke dalam tiga bentuk, yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Peran aktif merupakan peran yang dijalankan seseorang atau kelompok berdasarkan kedudukan dan kewenangannya dalam suatu organisasi. Peran partisipatif merupakan kontribusi yang diberikan anggota kelompok kepada kelompoknya sehingga memberikan manfaat bagi organisasi maupun masyarakat. Sementara itu, peran pasif merupakan kondisi ketika seseorang tidak terlibat secara langsung dalam suatu aktivitas, tetapi tetap memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meyakini bahwa Islam tidak hanya dipahami sebagai identitas atau program politik semata, melainkan sebagai ajaran yang bersifat menyeluruh (kaffah) dan menjadi pedoman hidup dalam berbagai aspek kehidupan. Pandangan tersebut menjadi landasan bagi PKS dalam membangun karakter kader dan merumuskan berbagai kebijakan yang berorientasi pada nilai-nilai Islam (Nurhakim, 2023).

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Fatiyatul Awfar, masyarakat Kota Banda Aceh, yang diwawancarai pada 3 Agustus 2026:

“Partai Keadilan Sejahtera mempunyai peran aktif yang begitu besar terhadap penguatan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat melihat PKS sebagai salah satu aktor politik yang berperan aktif dalam mendukung penguatan Syariat Islam. Peran tersebut dapat dilihat melalui berbagai kegiatan dakwah, pembinaan sosial kemasyarakatan, serta dukungan terhadap kebijakan publik yang berkaitan dengan penerapan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pengawasan terhadap berbagai qanun daerah dan program-program pemerintah yang berorientasi

pada penguatan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif politik Islam, tujuan utama politik adalah mengatur urusan umat dan membangun tata pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (Sucirahmadani, 2025). Oleh karena itu, keterlibatan PKS dalam penguatan Syariat Islam tidak hanya dipandang sebagai aktivitas politik semata, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.

PKS juga berperan aktif dalam mendukung berbagai program Pemerintah Kota Banda Aceh yang bertujuan memperkuat implementasi Syariat Islam. Bentuk dukungan tersebut antara lain melalui pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam yang berlaku di Aceh. Salah satu contoh program yang mendapat perhatian adalah Program Gampong Syariat yang bertujuan memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam di tingkat masyarakat. Sebagai partai yang memiliki basis ideologi Islam, PKS tidak hanya berfungsi dalam konteks politik, tetapi juga memiliki dimensi dakwah yang menjadi karakteristik tersendiri dalam aktivitas politiknya (Adiwilaga, 2023).

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Faisal Qasim selaku Sekretaris DPD PKS Kota Banda Aceh yang diwawancarai pada 2 Juni 2026:

“Partai Keadilan Sejahtera sangat berperan dalam lahirnya qanun di Kota Banda Aceh, baik dalam proses pembuatan kebijakan maupun penyusunan qanun. Apalagi dengan posisi PKS sebagai Ketua DPRK Banda Aceh, tentu sangat berperan dalam mendukung penerapan Syariat Islam di Banda Aceh karena di dalam qanun terdapat nilai-nilai Islam yang menjadi dasar pengaturannya.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PKS memiliki peran strategis dalam proses pembentukan qanun di Kota Banda Aceh. Posisi PKS sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRK Banda Aceh memberikan ruang yang lebih besar untuk memengaruhi arah kebijakan daerah, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan penguatan Syariat Islam. Melalui fungsi legislasi, kader-kader PKS dapat terlibat secara langsung dalam penyusunan rancangan qanun, pembahasan kebijakan, hingga proses pengesahan regulasi yang mendukung implementasi Syariat Islam.

Selain fungsi legislasi, DPRK juga memiliki fungsi pengawasan dan representasi masyarakat. Ketiga fungsi tersebut memberikan peluang yang besar bagi PKS untuk mengawal pelaksanaan kebijakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh (Wijaya, 2025). Dengan dukungan politik yang kuat di parlemen daerah, PKS memiliki kapasitas untuk mendorong lahirnya regulasi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam serta memastikan implementasinya berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, peran aktif PKS dalam penguatan Syariat Islam di Kota Banda Aceh terlihat pada seluruh tahapan proses kebijakan. PKS tidak hanya berperan dalam proses perumusan kebijakan, tetapi juga terlibat dalam penyusunan substansi qanun, pengambilan keputusan, hingga pengawasan terhadap implementasi kebijakan. Kekuatan politik yang dimiliki PKS sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRK Banda Aceh semakin memperkuat pengaruhnya dalam menentukan arah kebijakan daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PKS menjalankan peran aktif dalam penguatan Syariat Islam di Kota Banda Aceh melalui keterlibatan yang intensif dalam proses legislasi, dukungan terhadap program-program pemerintah berbasis syariat, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Peran tersebut menunjukkan bahwa PKS tidak hanya berfungsi sebagai partai politik yang berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga sebagai aktor yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan daerah.

Peran Partisipatif Partai Keadilan Sejahtera Dalam Penguatan Syariat Islam di Kota Banda Aceh

Partai politik memiliki peran penting dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui berbagai mekanisme politik yang tersedia. Sebagai lembaga representasi rakyat, partai politik berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah dalam proses perumusan dan

pelaksanaan kebijakan publik (Pratiwi, 2025). Dalam konteks penguatan Syariat Islam di Kota Banda Aceh, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjukkan peran partisipatif melalui keterlibatannya dalam proses legislasi, penganggaran, pengawasan, serta kegiatan sosial-keagamaan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Salah satu bentuk peran partisipatif PKS terlihat melalui keterlibatan kader-kadernya yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh dalam proses pembentukan qanun. Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki fungsi legislasi yang memberikan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan anggota PKS sebagai partai dengan jumlah kursi terbanyak di DPRK Banda Aceh memberikan peluang yang lebih besar untuk memperjuangkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada penguatan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Dalam sistem pemerintahan demokratis, jumlah kursi yang dimiliki suatu partai politik di parlemen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses pengambilan kebijakan. Semakin besar dukungan politik yang dimiliki suatu partai, semakin besar pula kemampuannya dalam memengaruhi arah kebijakan yang akan ditetapkan. Oleh karena itu, posisi PKS sebagai salah satu kekuatan politik utama di DPRK Banda Aceh menjadi modal penting dalam mendukung kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penerapan Syariat Islam.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Faisal Qasim selaku Sekretaris DPD PKS Kota Banda Aceh yang diwawancarai pada 2 Juni 2026:

“Kemudian Partai PKS Kota Banda Aceh sangat mendukung setiap kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh, baik dalam bentuk dukungan politik, apresiasi, maupun melalui budgeting, karena salah satu tugas DPR adalah fungsi penganggaran.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peran PKS tidak hanya terbatas pada proses legislasi, tetapi juga mencakup fungsi penganggaran (budgeting). Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, ketersediaan anggaran merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan program. Dukungan anggaran yang memadai akan mempermudah pelaksanaan berbagai program penguatan Syariat Islam, baik dalam bentuk pembiayaan operasional, kegiatan pembinaan masyarakat, maupun kebutuhan teknis lainnya di lapangan. Fungsi penganggaran yang dimiliki DPR menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa program-program berbasis Syariat Islam memperoleh dukungan sumber daya yang memadai untuk diimplementasikan secara efektif.

Selain fungsi legislasi dan penganggaran, PKS juga menjalankan peran partisipatif melalui fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Keberadaan kader-kader PKS di DPRK Banda Aceh memungkinkan partai ini untuk mengawasi berbagai program yang berkaitan dengan penguatan Syariat Islam agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan tersebut juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan program serta mendorong lahirnya solusi terhadap berbagai hambatan yang dihadapi.

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi utama DPR yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harapan masyarakat. Melalui fungsi tersebut, DPR dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah (Lestari, 2026). Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh PKS menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas implementasi kebijakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Selain melalui fungsi kelembagaan di DPRK, PKS juga menjalankan peran partisipatif melalui berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Hal tersebut disampaikan oleh Faisal Qasim selaku Sekretaris DPD PKS Kota Banda Aceh pada 2 Juni 2026:

“PKS juga berperan dalam memperkuat Syariat Islam di Kota Banda Aceh melalui syiar Islam, seperti menghidupkan malam-malam sepuluh terakhir Ramadan di masjid-masjid yang ada di Kota Banda Aceh, sehingga dapat memberikan contoh yang baik dalam pelaksanaan Syariat Islam.”

Kegiatan syiar Islam tersebut menunjukkan bahwa PKS tidak hanya berperan melalui jalur formal

politik, tetapi juga melalui pendekatan sosial dan keagamaan yang bertujuan membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas tersebut menjadi sarana pendidikan sosial yang dapat memperkuat internalisasi nilai-nilai Syariat Islam di tengah masyarakat.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Putri Mutia Ilaura, masyarakat Kota Banda Aceh, pada 3 September 2026:

“PKS cukup sering turun langsung ke masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Dengan demikian, masyarakat merasa ikut dilibatkan dalam berbagai kegiatan tersebut.”

Keterlibatan langsung masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang diselenggarakan PKS menunjukkan adanya hubungan partisipatif antara partai politik dan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, PKS tidak hanya menjalankan fungsi politik, tetapi juga menjalankan fungsi edukatif dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai nilai-nilai Islam yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Penegakan dan penguatan Syariat Islam pada dasarnya tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga memerlukan proses internalisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat. Syariat Islam berfungsi sebagai pedoman moral dan sosial yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia secara menyeluruh (Fauzah Nur Aksa dkk., 2023). Oleh karena itu, berbagai kegiatan pembinaan dan pendidikan keagamaan yang dilakukan PKS menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Melalui kegiatan syiar Islam, pembinaan masyarakat, pengawasan kebijakan, dukungan anggaran, serta keterlibatan dalam proses legislasi, PKS telah menunjukkan peran partisipatif yang cukup signifikan dalam penguatan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Peran tersebut tidak hanya diwujudkan melalui aktivitas politik formal di lembaga legislatif, tetapi juga melalui pendekatan sosial dan keagamaan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan demikian, peran partisipatif PKS dapat dipahami sebagai upaya untuk memperkuat implementasi Syariat Islam melalui sinergi antara kebijakan pemerintah, lembaga politik, dan partisipasi masyarakat.

Peran Pasif Partai Keadilan Sejahtera Dalam Penguatan Syariat Islam di Kota Banda Aceh

Peran pasif merupakan salah satu bentuk peran yang dikemukakan oleh Soekanto (2001), yaitu peran yang tidak diwujudkan melalui keterlibatan langsung dalam pelaksanaan suatu kegiatan, tetapi melalui pemberian dukungan, kesempatan, atau legitimasi kepada pihak lain untuk menjalankan fungsi dan tugasnya. Dalam konteks penguatan Syariat Islam di Kota Banda Aceh, peran pasif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tercermin dalam bentuk dukungan struktural dan normatif terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penerapan Syariat Islam tanpa terlibat secara langsung dalam aspek teknis pelaksanaannya.

Partai politik pada dasarnya memiliki peran dalam menjalankan fungsi kekuasaan, baik ketika berada di dalam pemerintahan maupun ketika berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan politik yang melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan (Muslih dkk., 2022). Dalam hal ini, PKS memanfaatkan posisi politiknya di lembaga legislatif untuk memperkuat regulasi yang berkaitan dengan Syariat Islam melalui pembentukan, penyempurnaan, dan evaluasi qanun yang berlaku di Kota Banda Aceh.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Rizka Alvirra, masyarakat Kota Banda Aceh, yang diwawancarai pada 3 September 2026:

“PKS sangat terlibat aktif dalam pembuatan undang-undang yang mempunyai keterkaitan dengan nilai-nilai Islam yang ada di Kota Banda Aceh.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan PKS lebih banyak berada pada ranah kebijakan dan regulasi. Meskipun demikian, keterlibatan tersebut tidak berarti bahwa PKS secara langsung melaksanakan atau menegakkan aturan Syariat Islam di lapangan. PKS berperan dalam memberikan

legitimasi politik dan dukungan terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam, sedangkan pelaksanaan teknis kebijakan menjadi tanggung jawab lembaga eksekutif dan aparat yang berwenang.

Dalam struktur pemerintahan daerah di Aceh, terdapat pembagian tugas yang jelas antara lembaga legislatif dan lembaga pelaksana teknis. Lembaga legislatif bertugas membentuk dan mengawasi kebijakan, sedangkan pelaksanaan teknis penegakan qanun dilakukan oleh instansi yang memiliki kewenangan, seperti Wilayatul Hisbah (WH) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Oleh karena itu, peran pasif PKS tidak dapat dimaknai sebagai ketidakterlibatan dalam penguatan Syariat Islam, melainkan sebagai bentuk kontribusi yang diwujudkan melalui dukungan kebijakan dan penguatan regulasi.

Peran pasif PKS juga terlihat melalui fungsi pengawasan yang dijalankan di DPRK Banda Aceh. Dalam berbagai forum legislatif, PKS memberikan masukan, rekomendasi, serta evaluasi terhadap pelaksanaan qanun Syariat Islam yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah. Namun, partai ini tidak terlibat secara langsung dalam proses operasional pengawasan di lapangan maupun dalam tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran qanun. Melalui mekanisme kelembagaan yang dimiliki DPRK, PKS berupaya memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain melalui fungsi legislasi dan pengawasan, peran pasif PKS juga diwujudkan dalam bentuk dukungan moral dan politik terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah yang sejalan dengan nilai-nilai Syariat Islam. Dukungan tersebut dapat berupa penyampaian pandangan politik, pemberian rekomendasi kebijakan, partisipasi dalam forum diskusi publik, seminar, maupun kegiatan-kegiatan yang bertujuan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial. Dukungan tersebut bersifat normatif karena tidak dilakukan melalui intervensi langsung terhadap pelaksanaan teknis kebijakan, melainkan melalui penguatan wacana dan dukungan politik terhadap kebijakan yang ada.

Secara faktual, pelaksanaan Syariat Islam di Aceh memang didasarkan pada pembagian fungsi kelembagaan yang jelas antara aktor politik dan aparat pelaksana. Implementasi berbagai qanun, termasuk Qanun Jinayat, dilaksanakan oleh instansi yang secara hukum memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum. Sementara itu, partai politik berfungsi sebagai lembaga yang mendorong lahirnya regulasi, melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan, serta memberikan masukan terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi Qanun Jinayat, seperti efektivitas penegakan hukum, persepsi masyarakat terhadap hukuman cambuk, maupun koordinasi antarinstansi pelaksana, umumnya berada pada ranah teknis dan administratif. Dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut, PKS mengambil posisi sebagai aktor politik yang mendorong evaluasi dan perbaikan kebijakan melalui forum-forum legislatif tanpa terlibat secara langsung dalam proses penindakan. Melalui fungsi tersebut, PKS berupaya menjaga konsistensi penerapan Syariat Islam sekaligus memastikan bahwa pelaksanaannya tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa peran pasif PKS dalam penguatan Syariat Islam di Kota Banda Aceh bersifat struktural, normatif, dan institusional. Peran tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap pembentukan regulasi, pemberian legitimasi politik terhadap kebijakan Syariat Islam, pelaksanaan fungsi pengawasan melalui DPRK, serta dukungan moral terhadap berbagai program pemerintah daerah yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai Islam. Meskipun tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan teknis di lapangan, kontribusi tersebut tetap memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjaga keberlanjutan, konsistensi, dan efektivitas kebijakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Tabel 1: Peran PKS Dalam Penguatan Kebijakan Syariat Islam

No	Tema Utama	Persentase	Kategori
1	Dukungan PKS terhadap Penguatan Kebijakan Syariat Islam di Banda Aceh	95%	Sangat Tinggi
2	Peran PKS dalam legislasi suatu aturan	97%	Sangat Tinggi
3	Peran PKS dalam edukasi syariat islam terhadap masyarakat kota Banda Aceh	90%	Sangat Tinggi
4	Partisipatif Anggota DPRK Fraksi PKS dalam implementasi syariat islam di kota Banda Aceh	96%	Sangat Tinggi

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Sekretaris DPD PKS Kota Banda Aceh serta beberapa masyarakat Kota Banda Aceh sebagai informan pendukung. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dan dikonfirmasi dengan kondisi empiris yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam penguatan kebijakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam penguatan kebijakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa PKS memiliki peran yang signifikan dalam mendukung dan memperkuat implementasi kebijakan Syariat Islam melalui fungsi-fungsi politik yang dimilikinya. Peran tersebut dapat dianalisis berdasarkan teori peran Soekanto (2001), yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Dalam peran aktif, PKS memanfaatkan posisi strategisnya di Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, termasuk sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak dan menduduki posisi Ketua DPRK, untuk mendorong lahirnya qanun-qanun yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai Syariat Islam. Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku di Aceh. Dengan kekuatan politik yang dimiliki, PKS mampu memberikan pengaruh yang cukup besar dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan daerah.

Dalam peran partisipatif, PKS terlibat secara langsung dalam proses pembentukan kebijakan melalui mekanisme legislasi dan penganggaran, serta mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan memperkuat nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Bentuk partisipasi tersebut terlihat melalui dukungan terhadap kegiatan syiar Islam, pembinaan keagamaan, serta berbagai program sosial yang melibatkan masyarakat secara langsung. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa PKS tidak hanya berperan pada tataran kebijakan, tetapi juga berupaya memperkuat implementasi Syariat Islam melalui pendekatan sosial dan keagamaan. Sementara itu, dalam peran pasif, PKS tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan teknis maupun penegakan hukum Syariat Islam di lapangan karena fungsi tersebut merupakan kewenangan lembaga eksekutif dan aparat penegak hukum, seperti Wilayatul Hisbah (WH) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Meskipun demikian, PKS tetap memberikan dukungan melalui penguatan regulasi, fungsi pengawasan, evaluasi kebijakan, serta pemberian legitimasi politik terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan dengan implementasi Syariat Islam. Peran pasif tersebut menunjukkan adanya pembagian fungsi kelembagaan yang berjalan sesuai dengan sistem pemerintahan daerah dan prinsip checks and balances.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki

peran yang strategis dalam penguatan kebijakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, serta dukungan sosial dan politik terhadap berbagai program berbasis Syariat Islam. Dengan demikian, penguatan kebijakan Syariat Islam yang dilakukan oleh PKS tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif melalui keterlibatan aktif dalam proses pembentukan, pengawalan, dan evaluasi kebijakan yang mendukung penerapan nilai-nilai Islam di Kota Banda Aceh.

REFERENSI

- Abdul Kadir Lafuil, & Umar, K. (2022). Kedudukan partai oposisi terhadap keberlangsungan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 96–107.
- Adiwilaga, R. (2023). Hak asasi manusia dalam perspektif kelompok Islam politik: Studi pada perspektif Partai Keadilan Sejahtera menyikapi isu hak asasi manusia. *Jurnal*, 36–50.
- Afrijal, A., & Helmi, H. (2022). Pelaksanaan otonomi khusus di bawah kekuasaan partai politik lokal di Aceh. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7(4), 1–6.
- Alamsyah, S. B., & Hendra, H. (2023). Peran sayap kepemudaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam meningkatkan partisipasi politik generasi milenial dan generasi Z di Indonesia. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, 2(1), 54.
- Alqarni, W., Saleh, R., Anggraini, T., Sulaksono, T., & Akhyar, M. N. (2024). The strategic role of local political parties in the legislative process qanun for sharia financial institutions in Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(3), 1881–1990.
- Alqarni, W., Syamsudin, M. H., & Saleh, R. (2023). Upaya membangun public trust terhadap partai politik di Provinsi berbasis syariat Islam Aceh. *Politea*, 6(2), 216.
- Athiyyatul Mufidah, & Syarofi, A. (2024). Hubungan antara demokrasi partai politik dalam pemilihan umum di Indonesia (tinjauan sosiologi politik). *The Republic: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 35–51.
- Barokah, F., Maryanah, T., Darmastuti, A., & Hertanto, H. (2022). Disrupsi politik: Peluang dan tantangan partai politik baru jelang Pemilu 2024. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 1–13.
- Fahrudi, D., & Fahrudin, A. (2023). Pemanfaatan media sosial dalam kampanye politik menjelang Pemilu 2024. *JIKA: Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan*, 6(2), 118–132.
- Fauzah Nur Aksa, Saifullah, T., & Farabi, A. (2023). The implementation of Qanun Jinayat in Aceh. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 8(1), 133–152.
- Ghifari, M. A. (2025). Peran Partai Adil Sejahtera dalam pendidikan politik bagi santri dayah modern Kota Banda Aceh. *Jurnal*, 1–12.
- Hanyfah, S., Fernandes, G. R., & Budiarto, I. (2022). Penerapan metode kualitatif deskriptif untuk aplikasi pengolahan data pelanggan pada car wash. *Seminar Nasional Riset Teknologi*, 6(1).
- Haq, V. A. (2024). Peran kader perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam optimalisasi partisipasi politik perempuan. *Parapolitika: Journal of Politics and Democracy Studies*, 5(1), 28–45.
- Jabir, R., Yusmad, M. A., & Arif, F. M. (2024). Pemekaran daerah wilayah di Tana Luwu perspektif kedatuan Luwu, UU No. 9 Tahun 2015 dan hukum Islam. *Jurnal*, 20(2), 307–330.
- Jamba, P. (2024). Peran partai politik terhadap pembentukan kebijakan publik. *Jurnal*, 4(6), 1–13.
- Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). Masalah pelaksanaan fungsi partai politik dan dampaknya terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 4(2), 128–145.
- Lestari, E. Y. (2026). Presidential threshold dalam sistem presidensial dan implikasinya terhadap fungsi pengawasan DPR. *Jurnal*, 37(1), 93–103.
- Lianti, L., & Utami, P. D. (2023). Efektivitas tindakan pemerintah Indonesia dalam menyikapi perubahan iklim. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1), 85–93.
- Muslih, M., Perdana, A. P., & Kurnia, K. F. (2022). Peran partai politik dalam penyelenggaraan pemilu yang aspiratif dan demokratis. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 180–202.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 8 Agustus 2026

- Nurhakim, M. (2023). Kebebasan beragama dalam negara demokrasi: Perspektif Partai Keadilan Sejahtera. *Jurnal*, 18(2), 124–136.
- Pratiwi, L. (2025). Peran partai politik dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. *Open Access Journal*, 9(1).
- Rahayu, N. P., Ayuningsih, N., & Aulia, V. (2024). Partai politik dan representasi kepentingan masyarakat. *Jurnal*, 1(3), 558–569.
- Rohman, N. (2023). Peran Partai Solidaritas Indonesia dalam pemilihan Presiden 2024. *JPW: Jurnal Politik Walisongo*, 5(1), 85–102.
- Sucirahmadani. (2025). Peran partai PKS, Gerindra, dan Nasdem dalam pendidikan politik perempuan. *Jurnal Siyash Dusturiyah*, 1(1), 40–48.
- Susilawati, Y. (2023). Penguatan fungsi partai politik sebagai pencegahan polarisasi Pemilu 2024. *Jurnal*, 2(2), 110–123.
- Ulfa, M., Utami, I. P., & Muhrani, S. (2024). Urgensi dan peran partai politik dalam Islam menuju masyarakat. *Jurnal*, 14(1), 1–11.
- Wibowo, A. P., & Darmawan, C. (2021). Peran Partai Keadilan Sejahtera sebagai wahana pendidikan politik. *Bhineka Tunggal Ika*, 8(1), 1–9.
- Wijaya, M. A. (2025). Fungsi konstitusional DPR dalam perspektif hak rakyat. *Jurnal*, 4(2), 173–182.
- Zain, S. H. W., Wilis, E., & Sari, H. P. (2024). Peran pendidikan Islam dalam pembentukan karakter masyarakat berbasis Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal*, 2(4).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

397

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX

